GRAHA ILMU

LENSA KAPITAL SOSIAL DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Membangun Bridging Social Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Melalui Desa Ramah Anak

NOVERMAN DUADJI
NOVITA TRESIANA

Dipindai dengan CamScanner

LENSA KAPITAL SOSIAL DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Membangun Bridging Social Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Melalui Desa Ramah Anak

NOVERMAN DUADJI
NOVITA TRESIANA

GRAHA ILMU

Dipindai dengan CamScanner

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak pihak yang telah mendukung terselenggaranya riset, baik dari sisi dukungan dan dari aspek finasial berupa bantuan pendanaan riset. Informasi dan data yang diperoleh melalui riset menjadi sandaran dan memberikan pengkayaan substansi buku ini.

Pada kesempatan yang baik ini, ijinkanlah Tim penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (Dirjen Risbang) Kemenristekdikti/Kemendikbud Republik Indonesia.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Back to nature, barangkali sebagai ucapan pemantik untuk pembaca budiman yang sudah meluangkan waktunya untuk membaca karya ini hingga tuntas.

Isu, persoalan dan masalah anan-anak variatif dan kompleks serta sifatnya mengglobal (hampir terjadi pada semua negara). Beberapa yang terjadi di Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan menjadi pusat perhatian dalam tulisan ini. Selain karena persoalannya ini beragam tetapi juga menuntut tanggungjawab bersama semua pihak melalui program desa/pekon ramah anak guna mencapai kabupaten ramah anak.

Fokus yang sering menjadi dimensi diskursus serius tentang administrasi publik sebagai *governance* terkait dengan organisasi, manajemen, kepemimpinan dan kebijakan. Sementara urusan nilai, moral dan etika sebagai turus kultural, dalam laju perjalanannya melamban bahkan cenderung untuk ditinggalkan. Namun sisi lain, isu-isu nilai, moral dan etika semakin mengemuka. *Governance* jikalau hanya sebatas itu tidaklah cukup—bajunya sudah kekecilan ditengah kencangnya tiupan angin demokratisasi.

Pada tataran lokal, nasional bahkan global sifatnya, banyak pihak yang menyuarakan persoalan dan masalah keadilan, kesetaraan,

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**vii**
DAFTAR ISI		**xi**
DAFTAR GAMBAR		**xiii**
DAFTAR TABEL		**xv**
BAB 1	**PENDAHULUAN**	1
	1.1 Isu dan Kebijakan Pembangunan Anak	5
	1.2 Gambaran Isu Buku	19
	1.3 Daftar Pustaka	21
BAB 2	**PERSPEKTIF LENSA KAPITAL DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK**	**23**
	2.1 Governance dan Reposisi Administrasi Publik	26
	2.2 Lensa Kapital dan Reposisi Administrasi Publik	35
	2.3 Lensa Kapital Sosial dalam Kasus Strategi Bertahan Hidup	39
	2.4 Kesimpulan	42
	2.5 Daftar Pustaka	44
BAB 3	**MEMBANGUN MODEL *BRIDGING SOCIAL CAPITAL* PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI DESA RAMAH ANAK**	**49**
	3.1 Deskripsi Umum Kabupaten Lampung Selatan	49
	3.2 Profil Anak di Kabupaten Lampung Selatan	55

Dipindai dengan CamScanner

3.3 Potensi Kapital Sosial Kabupaten Lampung S
Identifikasi Kelembagaan dan Nilai Lokal
3.4 *Bridging Bonding Social Capital*
3.5 Mentautkan Model *Driver-Trigger* dengan Brid
Bonding Social Capital dalam Musrenbangda: P
Ramah Anak
3.6 Kesimpulan
3.7 Daftar Pustaka

**BAB 4 PERAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* BERB
PERENCANAAN WARGA**
4.1 *Collaborative Governance*
4.2 *Collaborative Governance* Perlindungan dan Pem
Hak Anak
4.3 Kegagalan Forum Musrenbangdes Sebagai Keg
Pelembagaan Kolaboratif
4.3 Kesimpulan
4.4 Daftar Pustaka

BAB 5 PENUTUP
Daftar Pustaka

-oo0oo-

Dipindai dengan CamScanner

BAB 1

PENDAHULUAN

Isu anak pasca pandemic Covid 19, memiliki keterhubungan yang lebih kuat dengan desentralisasi desa untuk melahirkan program pro anak di desa. Pembenahan tata kelola pemerintahan desa melalui keterlibatan aktif (dimensi partisipatif) praktisi, tokoh masyarakat, warga masyarakat, pemuda, perempuan dan termasuk anak-anak dalam penentuan arah program desa berbasis kebutuhan anak menjadi penting. Praktek demikian dikenal dalam administrasi publik dengan *democratic governance*. Suasana seperti inilah yang diyakini dapat meningkatkan tercapainya tujuan, terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak di desa

Kebijakan desentralisasi tata kelola pemerintahan memberikan ruang kreatif pemerintah lokal mengidentifikasikan ciri, memprioritaskan dan merespon secara tepat isu dan kendala khusus. Penyatuan pengetahuan lokal (nilai-nilai lokal), kewenangan legislatif dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan alokasi sumber daya di desa, diyakini menjadi dasar terciptanya inovasi kebijakan kesejahteraan dan perwujudan hak-hak anak dan perlindungan anak. Strateginya, memperkuat memperkuat pengetahuan lokal, partisipasi anak dan praktisi anak berkontribusi mengemukakan persoalan, kebutuhan, dan prioritas anak kedalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Kajian buku ini dilatarbelakangi isu-isu dan persoalan belum terpenuhinya hak anak, kebijakan pembangunan dan kebijakan desa yang

Dipindai dengan CamScanner

BAB 2

PERSPEKTIF LENSA KAPITAL DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Catatan Kecil tentang Novelty

Demokratisasi yang berlangsung luas di berbagai negara dunia setelah berakhirnya perang dunia I, melahirkan negara-negara rejim demokratis. Seiring dengan itu tuntutan untuk menyusutkan peran negara dalam kehidupan berbangsa semakin meluas. Peran administrasi publik dalam konteks demikian secara imperatif mereposisikan dirinya sebagai *governance*, yang semula menjadi instrumen negara menjadi instrumen publik dalam konteks yang luas. Administrasi publik menjadi sarana utama untuk meningkatkan tercapainya tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi. Sekalipun demikian, *governance*, sebagai sebuah pendekatan dalam administrasi publik juga mulai memasuki ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai misalnya budaya, politik, informasi, komunikasi. Nilai-nilai formal yang direproduksi secara hirarkis dan rasional memang turut membangun watak reposisi ini. Tetapi aspek yang lebih penting dan strategis menentukan karakter administrasi publik adalah justru terletak pada idiom-idiom dan kuadran nilai spontan dan arasional yang menjadi modal sosial sebuah masyarakat. Karena itu peran kapital sosial dalam proses reposisi administrasi publik menjadi sangat penting dan lebih substantif. Apalagi citra *governance* sebenarnya banyak mengandalkan energi sosial yang dibangun secara otonom, kolboratif dan *genuinely* dari masyarakat. Dalam konteks inilah pejabat

Dipindai dengan CamScanner

BAB 3

MEMBANGUN MODEL *BRIDGING SOCIAL CAPITAL* PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI DESA RAMAH ANAK

Analogi sebuah bangunan—adanya lahan, ketercukupan material dan dukungan beberapa *resources* lain masih belum cukup, tetapi perlu gambar teknik untuk menjadi sebuah bangunan dengan tatanan apik. Demikian juga data dan informasi riset sebagai bahan kajian masih perlu dianalisis dan dirumuskan pemodelan yang tepat untuk menjadi sebuah ramuan konsep untuk memberikan dorongan pengembangan keilmuan, khususnya penempatan lensa kapital sosial ke dalam reposisi administrasi publik.

Bagian bab ini akan disajikan beberapa hal penting yang diangkat dari hasil penelitian Kompetitif Nasional— Skema Penelitian Dasar yang dibiayai oleh DIKTI Kemenristekdikti dengan tema Membangun Pekon Ramah Anak Berbasis Demokrasi Deliberatif: (Menggagas *Sound Governance Body dan Citizenship Education* dalam Musrenbangdes) yang dilakukan Duadji & Tresiana (2019). Hasil penelitian inilah yang menjadi sandaran membangunan model *bridging social capital* dalam program desa/pekon ramah anak di Kabupaten Lampung Selatan

3.1 Deskripsi Umum Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah di ujung selatan pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang masuknya arus orang, barang dan

Dipindai dengan CamScanner

BAB 4

PERAN *COLLABORATIVE GOVERNANCE* BERBASIS PERENCANAAN WARGA

Keberhasilan model pembangunan wilayah yang *responsive* terhadap perlindungan dan hak anak dengan membangun *Bridging Social Capital* memerlukan pelembagaan *collaborative governance* dan perencanaan berbasis *multistakeholders*, terutama keterlibatan warga. Kedua hal ini menjadi daya dukung percepatan perubahan nilai dan perspektif baru akan perlunya kapital sosial sebagai bentuk reposisi administrasi publik.

Pada bab keempat ini diuraikan pentingnya pelembagaan *collaborative governance* dalam pengambilan kebijakan dan keputusan penting di tingkat lokal. Media *collaborative governance* dilakukan dalam perencanaan lokal tahunan dalam bentuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Uraian pada bab ini sebagai dimensi penting percepatan terwujudnya pembangunan wilayah (desa) yang ramah anak.

4.1 *Collaborative Governance*

Ansell and Alison (2017) menjelaskan strategi baru sebagai pelembagaan dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari *governance* yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah

Dipindai dengan CamScanner

BAB 5

PENUTUP

Mengulas tentang administrasi publik, maka tentu saja hal pertama dan utama yang akan muncul dalam *mindset* orang kebanyakan-- langsung tertuju pada ilustrasi tengang proses kerjasama yang dilakukan sejumlah pihak tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang memberikan kontribusi kemaslahatan semua.

Pernyataan tersebut memang demikian adanya, karena peran administrasi publik merupakan sarana mengelola urusan publik dan menjamin ketercapaian tujuan publik, khususnya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi dan manipulasi. Banyak perspektif, pendekatan, dimensi dan paradigma yang telah dikembangkan untuk mengkaji lebih dalam, tajam dan komprehensif dalam memehami administrasi publik dan sebagai landasan fokus, baik dari sisi pengembangan keilmuan maupun pratek-praktik nyata administrasi publik dalam menyelesaikan urusan pembangunan, pelayanan, tatalaksana organisasi, regulasi, kemitraan dan banyak hal lainnya.

Paling tidak fokus yang sering menjadi lahan pergumalan dan wacana serius administrasi publik sebagai *governance* adalah berkaitan dengan organisasi, manajemen, kepemimpinan dan kebijakan. Sementara urusan nilai, moral dan etika sebagai turus kultural, dalam perjalanannya melamban lajunya bahkan cenderung untuk ditinggalkan. Padahal akhir-akhir ini, isu-isu nilai, moral dan etika semakin mengemuka. *Governance*

Dipindai dengan CamScanner

LENSA KAPITAL SOSIAL DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Membangun Bridging Social Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Melalui Desa Ramah Anak

ISBN 978-623-228-688-7

Diterbitkan Atas Kerjasama dengan

Dipindai dengan CamScanner